

BIROKRASI DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN : PENDEKATAN EKONOMI POLITIK

H. Ramlan Harahap *)

ABSTRACT

Applications of economic analysis and economic reasoning to the contiguous social science – principally political science – have increased considerably in the past thirty years. The joinder of economics and political science has also undergone a significant transformation. Kenneth Arrow's work on social choice, Anthony Downs's treatment of economic theory of democracy, Mancur Olson's work on constitutions were all implicated in this transformation. As recent conference volumes in many publications make clear, and the use of economic reasoning to examine politics and political institutions has become widespread and, for some issues, even essential. However, just as no complex society exists without markets, so no complex society exists without government or bureaucracy either. In this article, economic theory of politics or political economy of bureaucracy and the role of government in economy context is the approach applies the thinking and methods of modern economics to political processes.

Kata kunci: birokrasi, peran pemerintah, pendekatan ekonomi politik

Setiap masyarakat membutuhkan birokrasi karena tidak semua interaksi sosial bisa dikelola dengan mekanisme altruisme, anarki atau pasar. Birokrasi seringkali mempunyai konotasi yang negatif dan menjadi pandangan yang tidak netral. Sosiolog terkenal yang menulis tentang birokrasi dan dianggap paling baik adalah Max Weber. Weber menulis lebih realistis, di mana birokrasi sebagai organisasi selalu secara teknis dianggap lebih unggul dibandingkan dengan organisasi lainnya karena alasan untuk pengambilan keputusan dan dasar rasionalitas serta kepentingan yang ada di dalamnya. Pandangan ini lebih bersifat deskriptif sekaligus sebagai evaluasi terhadap kenyataan birokrasi di lapangan.

Menurut Weber (1990), ada tiga macam otoritas, yakni yang tradisional, kharismatik dan rasional. Tetapi, seringkali tidak ada orang-orang yang kharismatik di sekitar kita, sedangkan kepemimpinan tradisional sudah tidak mampu lagi mengatasi birokrasi yang kompleks,

sehingga kecenderungan umum di masyarakat modern adalah *rational bureaucratic authority*. Weber melihat ada enam karakteristik birokrasi.

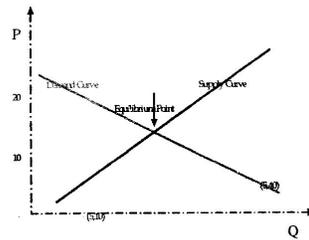
- (1) Tugas pemerintahan dibagi ke dalam area hukum tertentu;
- (2) Ada piramida hirarkis dari otoritas di dalam organisasi;
- (3) Manajemen dari kegiatan resmi birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis;
- (4) Aparat birokrasi yang ada dilatih secara khusus;
- (5) Aparat birokrasi bekerja penuh untuk tugas-tugasnya; dan
- (6) Lembaga birokrasi digerakkan dengan aturan-aturan yang tetap.

Hal yang penting dipahami terkait dengan karakteristik birokrasi di atas adalah tugas-tugas birokrasi tidak hanya menyangkut urusan sosial dan politik, melainkan juga menyangkut masalah-masalah ekonomi. Peranan negara dalam bidang ekonomi berbeda dengan tugas-tugasnya dalam bidang sosial dan politik. Tugas-tugas dalam bidang ekonomi harus mempertimbangkan perspektif teori-teori ekonomi yang mengarah pada pasar,

*)Pegawai Departemen Pendidikan Nasional, Tinggal di Jakarta

efisiensi, pencapaian tujuan keuntungan yang optimal dan kesejahteraan anggota masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perspektif birokrasi dari sisi ekonomi semakin menonjol sebagai objek analisis para pakar ekonomi politik yang menganggap bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi harus diselaraskan dengan cara kerja ekonomi mikro.

Barang-barang yang diperdagangkan di pasar membentuk kurva penawaran dan permintaan. Keduanya diukur pada *space* di mana harga diukur sepanjang sumbu vertikal dan kuantitas di sepanjang sumbu horizontal. Pada berbagai tingkat harga (dari nol) dapat ditemukan berapa banyak barang yang dapat disediakan untuk *supply*. Kombinasi harga dan kuantitas seperti ini menunjukkan satu titik pada satu tempat. Pada saat ini misalnya, titik 5, 10 ada di kurva penawaran, artinya jika harganya 5 maka akan ada penawaran 10 unit. Secara normal, slope kurva penawaran akan naik dari kiri ke kanan sepanjang diagram; lebih tinggi harga, lebih banyak barang yang disediakan di pasar. Demikian juga harga, dengan naik turunnya titik harga, dapat ditemukan berapa banyak barang yang akan dibeli oleh konsumen.



Kurva permintaan menghubungkan semua kombinasi harga dan kuantitas. Titik 5,40 ada di kurva permintaan: artinya bahwa jika harga 5 maka akan ada permintaan sejumlah 40 unit. Secara normal slope kurva permintaan akan: semakin tinggi harga, semakin sedikit konsumen yang membeli.

Titik dimana terjadi persimpangan kurva disebut titik ekuilibrium. Di dalam ekuilibrium kuantitas tertentu dari suatu barang dibuat dan dijual pada harga tertentu dimana benar-benar *clears the market*. Dalam persaingan pasar sempurna, kapan saja harga dan kuantitas bergerak dari ekuilibrium, hasil dari barang yang tidak terjual atau permintaan yang tidak puas akan memberikan tanda di mana secara otomatis menyesuaikan penawaran dan permintaan sehingga *the market clears* ada di ekuilibrium baru.

Analisis *public choice* mengenai birokrasi telah berusaha untuk memberlakukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa pemerintah dengan jalan yang sama dengan ekonomi mikro klasik memperlakukan permintaan dan penawaran dalam penjualan barang-barang dan jasa. Permintaan yang paling segera untuk komoditi birokrasi datang dari pemerintah. Dalam pemerintahan yang demokratis dapat terjawab dalam *electorate* yang mempunyai kontrol yang kuat. Jika pemerintah meminta kepada suatu kantor dan hasilnya terlalu banyak atau terlalu sedikit ini mengandung risiko untuk tidak dipilih kembali dalam periode berikutnya.

Kebanyakan penulis *public choice* berasumsi bahwa pemerintah siap untuk membayar lebih jasa birokrasi daripada *electorate* yang sering ditemukan bahwa pemerintah cenderung menyediakan komoditi publik lebih rendah. Sejak itu kebanyakan penulis *public choice* termasuk Downs mempunyai perhatian yang kurang terhadap kurva permintaan.

Akan tetapi pemikiran ini bergerak jauh dari asumsi tradisional ekonomi mikro klasik.

Asumsi tradisional menyatakan bahwa perusahaan mencari keuntungan maksimal mungkin, yakni perbedaan antara penerimaan total dan biaya totalnya.

Memaksimumkan output, bagi birokrasi memaksimumkan anggaran. Pembenaan asumsi bahwa pejabat memaksimumkan anggaran, bukan keuntungan adalah bahwa secara normal tidak bisa memperoleh keuntungan. Seorang kapitalis monopoli akan membuat keuntungan yang sangat besar untuk dirinya sendiri; pejabat biasanya memonopoli pemasokan dari barang-barang.

Ekonomi dan warga biasa biasanya menyesalkan kekuatan dari monopoli, meskipun mereka mempunyai alasan yang berbeda. Kita sering berpikir bahwa seorang monopolis adalah seorang yang dapat menahan kita dari jatah dengan memasok sesedikit mungkin dari produknya dan membebani kita dengan sesuka hatinya. Meskipun demikian, kekuatan monopoli bukan tidak terbatas karena ia akan berhadapan dengan slope kurva permintaan yang menurun. Jenis monopoli yang paling kuat adalah "*discriminating monopolist*" karena banyak orang yang bersedia membayar lebih daripada yang lain. Dengan demikian, produsen dapat mengambil "*consumer surplus*" jika dia membebaskan harga tertinggi kepada orang yang bersedia membayar paling tinggi, begitu seterusnya sampai unit yang terakhir dijual pada harga dimana *marginal cost* dan *marginal revenue*-nya persis sama atau *marginal revenue* nol.

Sulit untuk bermain dengan trik semacam ini dengan barang-barang yang nyata, sebab banyak orang akan membeli barang dengan harga murah untuk kemudian menjual kembali dengan harga yang tinggi. Contoh dari "*price discrimination*" adalah penerapan pada pulsa telepon pada saat jam-jam sibuk.

Menurut Niskanen, birokrasi akan menyediakan komoditi yang tidak bisa dipindahkan seperti listrik, kesehatan dan

transportasi dengan melakukan diskriminasi harga dan menawarkan lebih dari penyediaan pasar.

Peran Pemerintah Dalam Perekonomian dan Perpajakan

Dalam setiap sistem perekonomian, baik pada sistem kapitalisme maupun sosialisme, pemerintah selalu memainkan peranan yang sangat penting. Konseptor kapitalisme murni Adam Smith (1776) berteori bahwa pada dasarnya pemerintah sebuah negara mempunyai tiga fungsi utama sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, misalnya prasarana jalan dan bendungan.

Dalam era perekonomian modern, tidak ada satupun negara kapitalis yang mampu menjalankan sistem kapitalisme secara murni. Mengapa pemerintah perlu memainkan peranan tertentu dalam perekonomian suatu negara? Tidakkah lebih baik jika perekonomian diserahkan sepenuhnya saja kepada sektor swasta? Terhadap pertanyaan ini, Adam Smith berpendapat bahwa dalam perekonomian kapitalisme, seseorang akan melakukan hal-hal yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis, yang seakan-akan telah diatur oleh tangan gaib yang tak nampak ("*invisible hand*"). Oleh karena itu, lingkup aktivitas pemerintah menjadi sangat terbatas, yaitu hanya pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta.

Prinsip kebebasan ekonomi ini, dalam kenyataannya selalu menghadapi berbagai benturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang harmonis di antara kepentingan masing-masing individu. Misalnya, kepentingan pengusaha sering

tidak sesuai dengan kepentingan karyawan dan bahkan saling bertentangan. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan dan wewenang untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Sektor swasta pun juga tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara global, sehingga perekonomian tidak mungkin dijalankannya sendiri sepenuhnya.

Dalam suatu sistem perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni peran alokasi yaitu dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, peran distribusi dan peran stabilisasi.

Peran Alokasi

Barang swasta (*private goods*) adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Namun, tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan oleh adanya kegagalan pasar (*market failure*). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang dan jasa tertentu, karena manfaatnya tidak hanya dinikmati secara pribadi tetapi juga oleh orang lain. Contoh barang dan jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar antara lain prasarana jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Udara yang tercemar oleh polusi menyebabkan berbagai macam penyakit. Setiap orang merasakan dampak negatif udara yang kotor, tetapi tidak seorangpun yang mau membeli alat untuk membersihkan udara. Alasannya, ketika ia membeli alat pembersih udara maka tidak hanya dirinya saja yang menikmati udara bersih tetapi juga orang lain di sekitarnya. Padahal ia tidak dapat melarang orang lain untuk ikut menghirup udara yang telah dibersihkannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pasar telah gagal

menyediakan barang dan jasa yang tidak memiliki sifat pengecualian, yaitu terhadap orang lain dalam menikmati barang tersebut. Lain halnya dengan barang swasta yang dapat disediakan melalui sistem pasar, karena barang-barang tersebut memiliki sifat pengecualian. Misalnya, bila seseorang membeli sepatu, maka orang itu dapat mengecualikan orang lain untuk ikut memakainya. Jadi, seseorang akan membeli sepatu tersebut bila membutuhkannya. Tetapi dalam kasus barang publik, seseorang tidak akan mau membersihkan udara, sekalipun orang itu memerlukan udara bersih karena tidak dapat mengecualikan orang lain yang juga mendapatkan manfaat dari udara yang bersih. Oleh karena itulah barang-barang publik disediakan oleh pemerintah, mengingat sistem pasar gagal mengakomodasikannya melalui mekanismenya ("*market mechanism*").

Namun, seberapa banyak pemerintah harus menyediakan barang-barang publik? Beberapa besar dana yang harus disediakan pemerintah untuk menyediakan jalan, pertahanan, keamanan, peradilan dan sebagainya? Mengingat dalam kasus barang-barang publik terdapat masalah pengutaran nilai kesukaan, maka pembayaran untuk penyediaan barang tersebut tidak dapat dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*). Dengan sistem pemungutan suara, setiap orang berusaha menggunakan haknya, sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Hasil pemungutan suara itu sendiri, memang tidak akan dapat memuaskan setiap orang, pasti ada pihak yang puas dan sebaliknya ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dengan menggunakan kriteria tertentu, hasil pemungutan suara akan dapat mendekati penyelesaian yang efisien, dalam mekanisme pasar.

Peran Distribusi

Peranan pemerintah di bidang alokasi sumberdaya ekonomi adalah mengusaha-

kan agar alokasinya dilakukan secara efisien. Peran lain yang perlu diusahakan pemerintah adalah menjadikannya sebagai alat distribusi pendapatan. Keberhasilan distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan. Sedangkan kemampuan memperoleh pendapatan bagi seseorang ditentukan oleh faktor-faktor pendidikan, bakat, dan sebagainya. Pemilikan faktor produksi sebagai sumber pendapatan tergantung dari permintaan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh pemilik faktor produksi. Sementara permintaan dan penawaran menentukan harga dari faktor produksi yang bersangkutan. Dan akhirnya pasar faktor produksi amat dipengaruhi oleh tingkat teknologi untuk menghasilkan suatu barang bersifat padat karya, sehingga permintaan akan tenaga kerja relatif lebih besar daripada permintaan akan modal.

Distribusi pendapatan yang ditimbulkan oleh sistem pasar seringkali dianggap tidak adil oleh masyarakat. Dalam ekonomi, masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan isu yang sangat rumit, karena masalah efisiensi kadang-kadang tidak sesuai dengan masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien, apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan masyarakat atau golongan masyarakat dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain. Hal ini tentu saja sulit, karena tidak satupun tindakan manusia yang tidak mempengaruhi pihak lain baik secara positif maupun negatif.

Misalnya, kebijakan pemerintah untuk melindungi produsen mobil dengan memproteksi masuknya mobil import. Kebijakan ini di satu pihak melindungi golongan produsen mobil dalam negeri dari pesaing luar negeri, namun di lain pihak juga merugikan konsumen mobil, yang harus membayar harga yang jauh lebih mahal.

Pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran ("*government expenditure*"), misalnya dengan memberi kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk bagi para petani, dan seterusnya.

Peran Stabilisasi

Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai stabilisator perekonomian. Gangguan di satu sektor tentu akan mempengaruhi sektor yang lain, yang akhirnya akan bermuara pada terciptanya atau meningkatnya pengangguran dan terganggunya stabilitas ekonomi. Solusinya, sebagai mana disarankan pertama kali oleh Keynes (1926) adalah dengan intervensi pemerintah. Namun, dalam peranan sebagai alokator sumber ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi, dapat pula timbul pertentangan di antara berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, ada satu pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai apabila investasi masyarakat meningkat ("*development hypothesis view*"). Pada umumnya, investasi dilakukan oleh golongan kaya dengan cara menabung lebih banyak daripada orang miskin. Apabila pemerintah menghendaki pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka dana swasta dalam negeri harus dikerahkan sebanyak mungkin. Hal ini berarti bahwa kelompok kaya, yang berpotensi amat besar sebagai lokomotif investasi nasional, harus dikenakan pajak yang lebih rendah, sebagai insentif yang menyebabkannya dapat menabung dan menanamkan investasi lebih banyak. Akan tetapi, pengenaan pajak yang rendah terhadap orang kaya sehingga relatif lebih rendah daripada yang dibebankan kepada kepompok miskin, jelas bertentangan dengan prinsip pajak itu sendiri, sekalipun dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, sekalipun ketiga fungsi pemerintah tersebut secara teoritis dapat

dipisahkan, namun dalam kenyataannya tidak. Implikasinya, sebuah kebijakan mesti diambil sesudah melalui berbagai pertimbangan dari berbagai aspek yang mengakomodasikan fungsi-fungsi lainnya.

Peran Intervensi Pemerintah Yang Optimal

Peranan intervensi pemerintah sangat penting karena pada kenyataannya pasar persaingan sempurna hanya dapat diwujudkan pada kasus-kasus yang sangat terbatas. Bentuk pasar yang lebih sering ditemui adalah pasar persaingan tidak sempurna. Hal ini terjadi karena distorsi-distorsi yang menyebabkan kegagalan mekanisme pasar menjalankan fungsinya, yakni mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Penyebab kegagalan pasar adalah adanya ketidak sempurnaan pasar, barang publik, kegagalan informasi dan eksternalitas.

Salah satu kewajiban pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta. Masalahnya adalah seberapa besar pemerintah harus menyediakan barang publik, karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Penyediaan barang publik dalam jumlah yang terlalu besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber-sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang dan jasa publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk mendapatkan cara mengenai penentuan jumlah barang publik, dapat digunakan teori yang dikembangkan dalam ilmu politik yaitu pemungutan suara (*voting*).

Pemungutan suara dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi cara yang terbaik adalah dengan aklamasi, dimana suatu pemerintah akan dilaksanakan hanya apabila semua seorang menyatakan setuju. Hasil yang diperoleh dengan cara aklamasi, akan sama dengan mekanisme pasar, sehingga bisa dicapai hasil yang terbaik.

Namun, cara aklamasi pun dalam praktek juga sering sulit direalisasikan, sehingga muncul alternatif lain mengenai jumlah suara minimal yang diperlukan dalam suatu pemungutan suara. Buchanan dan Tullock mencoba memberikan jawaban bahwa pemungutan suara harus dilakukan dengan cara meminimalkan biaya pemungutan suara.

Pemungutan suara dengan cara pemilihan langsung sulit dilakukan di negara-negara yang berpenduduk sangat banyak karena faktor pembiayaan. Maka dalam hal ini pemungutan suara untuk memilih program pemerintah yang dilakukan secara demokratis melalui perwakilan rakyat. Masalahnya adalah apakah dengan cara ini dapat dijamin bahwa suara wakil rakyat selaras dengan kehendak rakyat yang diwakilinya.

Pengamat ekonomi Arrow menunjukkan bahwa semua sistem voting harus memenuhi beberapa syarat agar hasilnya efisien dan terhindar dari keadaan dimana voting tidak menghasilkan keputusan apapun. Untuk beberapa jenis barang tertentu terutama yang bersifat lokal, keputusan politik dalam menetapkan jumlah produksi barang publik dapat berfungsi dengan efisien. Downs mengatakan untuk barang publik yang bersifat nasional, sistem voting yang biasanya dilakukan dengan cara demokrasi perwakilan kurang dapat mencerminkan efisiensi. Oleh karena itu, peranan pemerintah di negara berkembang dalam penyediaan barang dan jasa cenderung menjadi lebih besar daripada tingkat yang optimal.

Pemerintah setidaknya mempunyai beberapa keuntungan dalam intervensinya untuk melakukan terhadap pasar, yaitu:

- a. Kekuatan memberlakukan pajak; Pemerintah dapat memberlakukan pajak terhadap semua warganya.
- b. Kekuatan untuk mengatur; Pemerintah dapat membuat aturan yang tidak merugikan pengusaha kecil.
- c. Kekuatan untuk menegakkan hukum;

dengan kekuatan untuk membuat aturan, maka pemerintah dapat memberlakukan hukum yang berkonsekuensi terhadap tindakan hukum.

Penerimaan pajak merupakan sumber dana penting bagi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi pemungutannya. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kesadaran masyarakat untuk membayar terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa di dunia ini tidak satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau tanpa mengorbankan sesuatu.

Juga dalam melaksanakan undang-undang pajak, pemerintah seyogyanya mulai berinisiatif untuk menjatuhkan sanksi

hukuman kepada penggelap pajak dengan konsekuensi. Demikian pula halnya dengan ancaman terhadap aparat yang melakukan manipulasi. Di Indonesia, basis pajak penghasilan (Pph) merupakan potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan, karena masih banyak wajib pajak yang belum terjaring. Untuk lebih meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak penghasilan, beberapa langkah dapat ditempuh antara lain: Melakukan "cross checking" terhadap wajib pajak potensial dengan memanfaatkan data dari instansi seperti Perbankan, Pasar modal, dan lain-lain.

Selain bertujuan meningkatkan penerimaan pemerintah, pajak penghasilan menjadi pusat perhatian, karena efek redistribusinya. Bagi Indonesia, redistribusi pendapatan masyarakat dengan perantara pajak belum menjadi kebutuhan mendesak, karena hal itu dapat dilakukan melalui instrumen pengeluaran pemerintah ("public expenditure"). Penerimaan pajak penghasilan relatif masih kecil sehingga efek redistribusinya juga masih sangat terbatas.

Daftar Rujukan

- Albow, Martin. *Birokrasi*, alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, PT. Tiara Wacana Yogya.
- Jenei, Gyorgy and John F. Witte. *The Role of the Bureaucracy in the Transition to Democracy*, <http://www.lib.bkae.hu/gt/2000-4/jenei.pdf>, diakses 28 April 2004.
- Lawrence E. Lynn, Jr., and Sydney Stein, Jr. *The Myth of the Bureaucratic Paradigm: What Traditional Public Administration Really Stood For*, 2nd Revised Draft October 4, 2000, http://www.harrisschool.uchicago.edu/pdf/wp_00_23.pdf, diakses 27 02 2004.
- Olson, Mancur. 1971. *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press USA.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- McLean, Iain. 1987. *Public Choice, an Introduction*, 432 Park Avenue South, New York, USA.
- Rachbini, Didik J. 1995. *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, CIDES Jakarta.
- Stevens, Joe B. 1993. *The Economics of Collective Choice*, Westview Press, USA.
- Weber, Max (1957), "Legitimate Authority and Bureaucracy, in D.S. Pugh (edited). 1971. *Organization Theory*, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, England.
- Williamson, Oliver E. 1996. *The Mechanisms of Governance*, Oxford University Press USA.